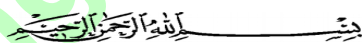




PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Mimika, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Pangan Sari Utama, semula berkediaman di Mimika, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia (Gaib), sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 September 2017, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Mmk, tanggal 7 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 118/29/III/2006, yang

Halaman 1 dari 15 halaman,

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/ PA.Mmk.



dikeluarkan oleh KUA Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tanggal 20 Maret 2006.

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat usia 20 tahun, sedangkan Tergugat usia 25 tahun.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Leo Mamiri gang Jabal Nur, RT.015/RW.003, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sampai sekarang.

4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan bernama Anak Penggugat dan Tergugat umur 9 tahun. Bahwa anak tersebut hingga kini tinggal bersama Penggugat.

5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 2 Oktober 2012 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :

a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Resi.

b. Tergugat tidak pulang ke rumah selama 10 bulan.

c. Tergugat sering berbohong ke Penggugat.

d. Tergugat tidak memberikan nafka batin selama 3 tahun.

6. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar tanggal 24 April 2017, pada saat itu Tergugat cuti tetapi tidak pulang ke rumah Penggugat, kemudian cuti berikutnya selama 3 bulan Tergugat tidak pulang rumah ke Penggugat. Tanpa ada alasan yang jelas. sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat saling cekcok, dan pada saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib).

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat

Halaman 2 dari 15 halaman,

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/ PA.Mmk.



juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat dan Penggugat pernah mendengar dari teman perempuan Tergugat kalau Tergugat telah memiliki wanitanidaman lain.

8. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mimika melalui Radio Publik Mimika pada tanggal 12 September 2017 dan tanggal 12 Oktober 2017, yang ~~rela~~asnya dibacakan di dalam sidang sedangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar lebih bersabar menunggu Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya upaya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 118/29/III/2006, tanggal 20 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P, paraf dan tanggal.

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual sembako, tempat tinggal di Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan Saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat di Timika pada tahun 2006.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ki Hajar Dewantara depan Babussalam selama 1 tahun, kemudian pindah ke Jalan Leo Mamiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir.



- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mengetahui pertengkaran tersebut dari cerita Penggugat bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain, saat Saksi mengkonfirmasi ke Tergugat ternyata Tergugat mengakui kalau Tergugat selingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, sehingga keberadaan Tergugat tersebut tidak diketahui dengan pasti.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan kabar keberadaannya kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat atau tidak.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat.

2. **Saksi 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, tempat tinggal di Jalan Bougenville (Depan Masjid Al-Hidayah POM), RT.09/RW.02, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 halaman,

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/ PA.Mmk.



- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung Penggugat dan Saksi kenal Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat di Timika pada tahun 2006.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka.
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ki Hajar Dewantara depan Mesjid Babussalam selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah terakhir tinggal bersama di Sorowako sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengadu ke Saksi.
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada Saksi penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, sehingga keberadaan Tergugat tersebut tidak diketahui dengan pasti.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan kabar keberadaannya kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat atau tidak.

Halaman 6 dari 15 halaman,

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/ PA.Mmk.



- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi.

Bahwa Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon diputuskan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi maksud dalam Pasal 154 R.bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak layak dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Islam pada tanggal 18 Maret 2006, dan belum pernah bercerai, namun saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, maka Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Halaman 7 dari 15 halaman,

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/ PA.Mmk.



Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat di Pengadilan tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara ini di mulai dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pokoknya Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan sekitar tanggal 24 April 2017, pada saat itu Tergugat cuti tetapi tidak pulang ke rumah Penggugat, kemudian cuti berikutnya selama 3 bulan Tergugat tidak pulang rumah ke Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat saling cekcok, dan pada saat itu pula Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai sekarang. Selama itu, Tergugat tidak pernah pulang, serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan, sehingga berakibat pihak Tergugat dianggap dan atau telah

Halaman 8 dari 15 halaman,

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/ PA.Mmk.



mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun demikian, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian), maka untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam kasus perceraian serta tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil dalam *Kitab Al-Anwar Juz II* halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أوتواری أوغیبة جاز إثباته بالینه

Artinya: "Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan Putusan berdasarkan bukti".

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti P, bukti tersebut merupakan akta otentik yang diterbitkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, yang isinya menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga mempunyai relevansi dengan perkara ini, serta sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, kedua orang saksi Penggugat tersebut, bukan termasuk saksi yang dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) RBg jo. pasal 1909 KUHPdata, serta sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, kedua orang saksi



tersebut juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUHPdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 RBg, jo. pasal 1911 KUHPdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **Saksi 1 dan Saksi 2**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg.

Meimbang bahwa walaupun saksi Penggugat bernama **Saksi 1 dan Saksi 2**, tidak ada yang melihat terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi-saksi tersebut mengetahui sejak tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang dan sejak itu Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dengan Penggugat sebagaimana layaknya suami istri. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sebagaimana Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, yang mengabstraksikan kaedah hukum “Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat. Alat bukti berupa keterangan saksi harus memenuhi azas klasifikasi “*unus testis nullus testis*”, sebagai azas yang berlaku dalam hukum acara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi



Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi yang bernama **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil, memenuhi batas minimal alat bukti saksi, sebagaimana ketentuan pasal 306 RB.g dan pasal 1905 KUHPdata, serta keterangannya saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RB.g, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi dengan nilai kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, pada tanggal 18 Maret 2006.
- ✓ Bahwa sebelum menikah Penggugat bersatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka.
- ✓ Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Ki Hajar Dewantara.

Halaman 11 dari 15 halaman,

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



- ✓ Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, namun sejak awal tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Penggugat tidak tahu keberadaan Tergugat dengan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghaib).
- ✓ Bahwa Penggugat sudah pernah diberi nasihat agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tidak mau lagi menunggu Tergugat kembali dan ingin bercerai dari Tergugat.

Menimbang bahwa walaupun kedua orang saksi Penggugat tersebut tidak ada yang mengetahui terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat selama proses persidangan tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar retak dan sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan dalam firman Allah SWT dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam kitab *al-Thalaq min al-Syariat al-Islamiah wal Qanun*, halaman 40 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق
وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara



suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang bahwa dengan retak dan pecahnya bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukkan telah pecah pula hati Penggugat dan Tergugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa jika Majelis Hakim telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996, yang mengabstraksikan kaedah hukum "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul

Halaman 13 dari 15 halaman,

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/PA.Mmk.



akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (Empat ratus satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 1 Jumadil Awal 1439 Hijriah, oleh **Bahri Conoras, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rita Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Bahri Conoras, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hary Candra, S.H.I.

Halaman 14 dari 15 halaman,

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/ PA.Mmk.



Panitera Pengganti,

ttd

Rita Amin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30,000.00
2. Biaya proses	Rp 50,000.00
3. Biaya pemanggilan	Rp310,000.00
4. Redaksi	Rp 5,000.00
5. 0Meterai	Rp 6,000.00

Jumlah	Rp401,000.00
--------	--------------

(Empat ratus satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman,

Putusan Nomor 111/Pdt.G/2017/ PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)